

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan tata kelola dalam pelaksanaan pelaporan keuangan daerah untuk setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) di Indonesia mengalami kemajuan. Sebelumnya, sistem pelaporan keuangan dibuat secara manual atau menggunakan cara tradisional. Saat ini, aplikasi berbasis sistem informasi telah digunakan yang mencakup data terkait penggunaan serta pelaporan tanggung jawab keuangan di berbagai daerah. Pada masa kini hampir semua organisasi, baik yang bersifat komersial maupun pemerintah, memanfaatkan sistem manajemen informasi untuk pengelolaan keuangan.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, sistem informasi telah berkembang dan terbukti memainkan peran penting dalam strategi pembangunan dan kegiatan ekonomi. Dengan adanya sistem informasi, efisiensi, efektivitas, serta produktivitas di instansi pemerintah dan sektor bisnis meningkat, sehingga memudahkan terwujudnya masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Sistem informasi yang diperlukan, diterapkan, dan dikembangkan untuk pembangunan daerah adalah sistem yang berfokus pada mendukung perencanaan pembangunan di wilayah tersebut (Anggraeni, 2021).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas, mengingat banyak pihak yang memanfaatkan informasi dari laporan keuangan yang diterbitkan untuk berbagai kepentingan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi nasional. Laporan ini digunakan oleh berbagai pihak, seperti masyarakat, pejabat pemerintah, regulator,

lembaga audit, investor, pemberi pinjaman, donor, dan pemerintah itu sendiri. Peraturan tersebut menekankan pentingnya laporan keuangan yang memiliki kualitas relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Aspek ini sangat penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif melibatkan serangkaian proses mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap anggaran dan sumber daya keuangan daerah, dengan tujuan mencapai kinerja keuangan yang optimal, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan (Aprilia dan Ikriyati, 2021). Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang andal sangatlah diperlukan. Sistem informasi akuntansi yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan sistem yang terintegrasi sangat penting untuk menjamin keakuratan dan keandalan data keuangan daerah (Mardiasmo, 2020). Dalam buku Manajemen Keuangan disebutkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada komitmen semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, pengembangan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan pengendalian internal menjadi sangat krusial (Indriani, 2021).

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah adanya peraturan yang jelas dan konsisten yang dapat dipatuhi oleh seluruh otoritas pemerintah daerah. Pentingnya evaluasi dan audit rutin untuk memastikan bahwa pengendalian keuangan memenuhi standar yang ditetapkan. Menerapkan sistem informasi akuntansi dengan benar, menetapkan pengendalian internal yang kuat, dan mematuhi persyaratan peraturan memastikan bahwa laporan keuangan kota memiliki

kualitas tinggi, relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan (Munandar, 2022).

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem yang diterapkan secara menyeluruh di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan yang baik harus didukung oleh teknologi informasi yang canggih agar pemerintah dapat mengakses dan mengelola informasi dengan cepat, tepat, dan efisien. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan serta mendistribusikan informasi keuangan kepada masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi harus memahami dan menguasai dasar-dasar akuntansi, memahami regulasi terbaru, dan mampu menerapkan sistem informasi akuntansi secara efektif. Memiliki integritas dan etika kerja yang tinggi untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara jujur dan tanpa manipulasi. Kompetensi ini meliputi kemampuan teknis dalam penyusunan laporan, analisis data keuangan, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi yang mendukung proses pelaporan (Andriani dan Hamzah, 2022).

Untuk memastikan laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah penting. Menurut Azzindani dan M. Irwan (2020) *good government governance* memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, terutama terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan tata kelola yang baik ini menjadi kunci utama dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. *Good Governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang mencakup prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini berfokus pada bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan dengan melibatkan masyarakat secara langsung serta memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. *Good Governance*

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik (Akmal dan Mustika, 2022).

Terdapat kebutuhan yang mendesak akan teknologi yang mampu menyajikan informasi yang tepat, relevan, dan lengkap. Salah satu sistem informasi yang krusial dalam sektor publik serta lembaga pemerintahan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem ini merupakan rangkaian proses yang mencakup pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data akuntansi serta data lainnya untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (Smith dan Williams, 2022). Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang bernilai. Laporan keuangan tersebut memberikan gambaran mengenai posisi keuangan lembaga pemerintah, termasuk aset, kewajiban, serta kekayaan bersih. Informasi ini berfungsi untuk mengevaluasi kondisi finansial lembaga dan memberikan pandangan menyeluruh tentang kesehatannya secara finansial (Jones, 2023).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tahun 2023, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan. Informasi tersebut membantu para pengguna dalam membuat keputusan terkait keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem informasi akuntansi di seluruh organisasi, terutama dalam pengolahan data, di mana proses pengolahan yang sebelumnya manual kini telah beralih ke sistem komputerisasi. Pemanfaatan teknologi informasi kini telah menjadi bagian penting dalam kegiatan bisnis, baik swasta maupun pemerintah. Sistem informasi tentunya memberikan dampak yang besar pada hampir setiap aspek manajemen, termasuk manajemen keuangan.

Perkembangan akuntansi sektor publik saat ini semakin menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap kinerjanya kepada

masyarakat. Akuntansi sektor publik mencakup sistem pelaporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan secara akurat, relevan, dan dapat diandalkan, sehingga memungkinkan publik untuk menilai kinerja lembaga pemerintah. Lembaga sektor publik yang berhubungan dengan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan. Tujuannya adalah mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan publik (Kiranayanti dan Erawati, 2022).

Untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan instansi pemerintah harus mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan aktivitas pemerintahan. Pemerintah daerah menetapkan target jangka waktu tertentu dalam rencana kerja, yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan pemerintah daerah, seperti keandalan dalam penyusunan laporan keuangan, efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Rahman dan Wijaya, 2022).

Saat ini, laporan keuangan menjadi fokus yang menarik, karena kesalahan dalam penyusunannya telah menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 dan 2023. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 1.1
Realisasi Rencana Kerja Tahun 2022

Tahun 2022	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Belanja Operasi	Rp. 10.530.940.593	Rp. 8.805.785.780	83,62%
Belanja Modal	Rp. 1.143.539.311	Rp. 893.858.724	78,17%
Total Belanja (Operasi + Modal)	Rp. 11.674.479.904	Rp. 9.699.644.504	83,08%
Penelitian & Pengembangan	Rp. 683.358.616	Rp. 630.557.656	92,27%
Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 440.317.030	Rp. 210.783.930	47,87%

Sumber: Data Bagian Keuangan BAPPEDA Mengenai Realisasi Renja Tahun 2022

Tabel 1.2
Realisasi Rencana Kerja Tahun 2023

Tahun 2023	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Belanja Operasi	Rp. 12.357.838.520	Rp. 10.330.202.160	83,59%
Belanja Modal	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.000.000.000	66,67%
Total Belanja (Operasi + Modal)	Rp. 13.857.838.520	Rp. 11.330.202.160	81,78%
Penelitian & Pengembangan	Rp. 800.000.000	Rp. 700.000.000	87,50%
Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp. 500.000.000	Rp. 250.000.000	50,00%

Sumber: Data Bagian Keuangan BAPPEDA Mengenai Realisasi Renja Tahun 2023.

Tabel data tersebut menunjukkan bahwa tingkat realisasi belanja modal yang rendah pada tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran BAPPEDA. Pada Tahun 2022, realisasi belanja modal hanya mencapai 78,17%, sementara pada Tahun 2023 menurun menjadi 66,67%. Rendahnya tingkat realisasi belanja modal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang direncanakan, terutama yang membutuhkan pengadaan barang atau proyek infrastruktur. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan dalam proses pengadaan, perencanaan yang kurang matang, atau masalah teknis di lapangan. Dampak dari ketidakefisienan ini adalah tertundanya pelaksanaan program yang penting bagi pembangunan daerah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Pengadaan barang milik daerah pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 menunjukkan realisasi yang jauh di bawah target, dengan hanya sekitar 47,87% di 2022 dan 50,00% di 2023. Fenomena ini menandakan adanya masalah struktural dalam pelaksanaan pengadaan barang di BAPPEDA. Ketidakefektifan target ini mungkin disebabkan oleh kendala dalam proses tender, ketidaksesuaian spesifikasi barang, atau masalah administrasi yang menyebabkan tertundanya pengadaan. Akibatnya, ketidakselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran pengadaan barang dapat menghambat operasional dan infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik. Jika hal ini berlanjut, bisa berdampak pada penurunan efektivitas pelayanan publik dan memperburuk citra pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.

Fenomena rendahnya realisasi belanja modal dan pengadaan barang juga mencerminkan potensi keterbatasan kapasitas SDM dalam mengelola anggaran dan proyek yang lebih kompleks di BAPPEDA. Meskipun belanja operasi telah terealisasi dengan baik, ketidakseimbangan dalam realisasi belanja modal menunjukkan bahwa SDM mungkin belum memiliki keahlian atau keterampilan yang memadai dalam merencanakan dan mengeksekusi proyek-proyek besar yang membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat. Hal ini mungkin juga menunjukkan kurangnya koordinasi atau pelatihan teknis bagi staf terkait pengelolaan anggaran dan proyek-proyek besar. Jika masalah ini tidak segera diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM, seperti pelatihan dan pengembangan keahlian manajerial, maka dampaknya bisa berlanjut pada ketidakefektifan penggunaan anggaran di tahun-tahun mendatang, yang menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 1.3
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2022

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDM	Rp. 497.780.000	Rp. 424.527.559	85,28%
Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan	Rp. 25.000.000	Rp. 3.450.000	13,8%

Teknis			
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Rp. 1.211.019.387	Rp. 1.021.530.948	84,35%
Analisis Data dan Informasi	Rp. 257.731.865	Rp. 195.252.139	75,76%

Sumber : Data Bagian Keuangan BAPPEDA Mengenai Realisasi Renja Tahun 2022.

Tabel 1.4
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2023

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Program Peningkatan Kapasitas SDM	Rp. 1.500.000.000	Rp. 750.000.000	50,00%
Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis	Rp. 250.000.000	Rp. 45.000.000	18,00%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Rp. 500.000.000	Rp. 320.000.000	64,00%
Peningkatan Profesionalisme ASN	Rp. 800.000.000	Rp. 400.000.000	50,00%

Sumber : Data Bagian Keuangan Mengenai Realisasi Renja Tahun 2023.

Tabel di atas menggambarkan potensi ketidakcukupan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022 dan 2023. Data yang disajikan mencakup berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM, di mana masing-masing program memiliki alokasi anggaran, realisasi, dan persentase realisasi yang menunjukkan seberapa baik setiap program dilaksanakan. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa program peningkatan disiplin dan kapasitas SDM memiliki realisasi sebesar 85,28%, mencerminkan bahwa mayoritas anggaran yang dialokasikan berhasil digunakan. Namun, terdapat potensi yang perlu diperhatikan, terutama pada program pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang hanya mencapai 13,8% realisasi. Rendahnya realisasi ini menandakan bahwa pegawai mungkin mengalami keterbatasan dalam akses pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Dengan kapasitas SDM yang terbatas, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terpengaruh.

Data tahun 2023 menunjukkan kondisi tersebut berlanjut dengan program peningkatan kapasitas SDM yang hanya terealisasi 50%, mencerminkan adanya tantangan yang lebih besar dalam pelaksanaan. Program pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis juga mengalami penurunan, dengan hanya 18% dari anggaran yang terealisasi. Ini sangat mengkhawatirkan, karena pelatihan merupakan kunci untuk pengembangan profesionalisme ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, program peningkatan profesionalisme ASN hanya terealisasi 50%, menegaskan perhatian lebih dalam memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai bagi pegawai. Meskipun program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan menunjukkan realisasi yang lebih baik dengan 64%, hal ini tetap mencerminkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan yang signifikan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kapasitas SDM, yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Berbagai penelitian terkait pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, termasuk Sari dkk. (2022) dan Leiwakabessy (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Sistem Informasi Akuntansi berdampak signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2022), terdapat hubungan yang kuat antara sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pada koperasi di Kecamatan Denpasar Selatan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Leiwakabessy (2020) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ayem dan Nugroho

(2020) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Lestari (2023), yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain pentingnya memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, pemerintah daerah juga harus memperhatikan aspek sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi berperan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, termasuk ketepatan waktu, relevansi, dan kemampuan untuk dibandingkan. Kompetensi yang baik mencakup pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kemampuan atau keahlian khusus, serta pemahaman yang mendalam tentang proses penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang (Animah., dkk. 2020).

Beberapa peneliti, seperti Loveli dkk. (2022) serta Ayem dan Nugroho (2020), telah melakukan penelitian terkait Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian Loveli dkk. (2022) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, temuan dari penelitian Ayem dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak memberikan pengaruh negatif maupun signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Azzindani dan M. Irwan (2020) mengungkapkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mukoffi dkk. (2021), menunjukkan bahwa meskipun penerapan prinsip-prinsip *good government governance* (seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) merupakan hal yang penting, namun pengaruhnya

terhadap kualitas laporan keuangan tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan faktor lain seperti audit laporan keuangan dan peran audit internal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faisal dkk. (2023). Perbedaan utama dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel Sistem Pengendalian Internal dan *good government governance* sebagai variabel intervening. Penambahan ini dilakukan karena beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan, di mana ada penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh, sementara yang lain tidak. Ketidakkonsistenan hasil tersebut mendorong peneliti untuk memasukkan variabel ini guna memastikan dan memperkuat apakah Sistem Pengendalian Internal benar-benar berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Sumber Daya Manusia terhadap Karakteristik Laporan Keuangan Dimediasi *Good Government Governance* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?

4. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap *good government governance* pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *good government governance* pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
6. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good government governance* pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
7. Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
8. Apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
9. Apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
10. Apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh sumber daya manusia terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
3. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
4. Untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *good government*

governance pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?

5. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *good government governance* pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
6. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap *good government governance* pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
7. Untuk menguji pengaruh *good government governance* terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
8. Untuk menguji pengaruh *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
9. Untuk menguji pengaruh *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?
10. Untuk menguji pengaruh *good government governance* mampu memediasi pengaruh sumber daya manusia terhadap karakteristik laporan keuangan pada badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi?

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penambahan referensi keilmuan terkait pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan sumber daya manusia terhadap karakteristik laporan keuangan yang dimediasi *good government governance*, khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Dengan hasil penelitian ini, peneliti kedepannya dapat menggunakan data dan temuan yang ada sebagai landasan untuk studi lebih lanjut. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menggali lebih dalam bagaimana Sistem Informasi Akuntansi dan pengendalian internal

mempengaruhi kualitas dan karakteristik laporan keuangan, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks instansi pemerintah daerah.

b. Bagi Instansi

Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya peningkatan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan sumber daya manusia terhadap karakteristik laporan keuangan yang dimediasi oleh *good government governance*. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan karakteristik laporan keuangan. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada sistem yang berlaku, instansi dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat membantu instansi dalam merumuskan kebijakan dan prosedur yang lebih baik, serta meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara lebih efektif.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi para peneliti yang tertarik dengan topik sistem informasi akuntansi, pengendalian intern, dan sumber daya manusia terhadap karakteristik laporan keuangan yang dimediasi *good government governance* dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan memberikan informasi yang relevan dan terperinci, studi ini dapat membantu pembaca dalam menemukan sumber referensi mengenai keterkaitan antara sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia dengan karakteristik laporan keuangan. Peneliti selanjutnya, baik akademisi maupun praktisi, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperluas pemahaman.

